

Melacak Arus Politik Islam Indonesia

—
Lucke Haryo S.P

Indonesia menjadi rumah bagi 12.7% dari seluruh populasi Muslim di dunia dan menempatkan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar. Jumlah ini pada gilirannya merepresentasikan 230 juta orang dari 264 juta warga Indonesia. Dengan jumlah ini, tak pelak Islam memiliki pengaruh yang panjang dan signifikan dalam dinamika kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia. Ramifikasi dari pengaruh ini juga tak jarang turut mewarnai pola dan pandangan hubungan internasional Indonesia dari waktu ke waktu. Peranan Islam inilah yang kemudian berusaha untuk dilacak oleh Williams, terhitung sejak era kolonial hingga reformasi di bawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada era pra-kemerdekaan, Islam merupakan salah satu pilar utama dalam kebangkitan nasionalisme Indonesia. Sarekat Dagang Islam (SDI) mewarnai lembar awal sejarah politik Indonesia dengan mengusung semangat ukhuwah dalam rangka melawan hegemoni pedangang asing di Nusantara. SDI kemudian berevolusi menjadi Sarekat Islam dan menginspirasi kelahiran organisasi Islam lain seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Kelindan Islam dan politik mengalami percabangan pada tahun awal berdirinya republik ini. Sisi pertama diwakili oleh gerakan Darul Islam (DI) yang menghendaki berdirinya negara berbasis Islam melalui perlawanan bersenjata. Berseberangan dengan elemen ini adalah Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) yang menerima eksistensi konstitusi sekuler yang berkesesuaian dengan nilai-nilai Islam dan turut berpartisipasi dalam kerangka demokrasi liberal kala itu. Sebagai salah satu partai utama, Masyumi memiliki peranan yang signifikan. Kabinet Masyumi menjadi pelopor dari berbagai kerjasama internasional baik dalam bidang politik maupun ekonomi untuk mewujudkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Praktik ini pada dipandang sebagai tindakan kapitalistik yang bertentangan dengan semangat revolusioner Presiden Soekarno dan kemudian mendasari marginalisasi Masyumi dalam periode demokrasi terpimpin.

Dinamika politik Islam kemudian meredup di bawah represi negara. Pertama, pengaruh partai Islam diberangus dengan dibubarkannya Masyumi yang diduga terlibat dalam gerakan PRRI. Kondisi ini sedikit berubah pada rezim Orde Baru yang menyediakan wadah politik bagi gerakan Islam dalam bentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) namun dengan pengaruh yang dibatasi oleh dirigisme negara. Pendekatan negara terhadap politik Islam kemudian berbalik menjadi lebih akomodatif



●
Yudhoyono's Third Way
oleh Mark S. Williams dalam
Indonesia's Ascent – C.B
Roberts et al (eds)

menyusul munculnya revivalisme Islam global semenjak tahun 1990an. Pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta penunjukan tokoh-tokoh hijau ke dalam lingkaran kuasa kabinet dan ABRI menandai langkah ini. Penyemaian benih Islam politik ini mulai berbunga seiring dengan kembalinya demokrasi. Pada tahun 2000-an Islam politik memanas ke dalam beragam organisasi massa maupun partai politik seperti Jamaah Islamiyah (JI), Front Pembela Islam (FPI), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Mengulangi dinamika yang terjadi lima dekade sebelumnya, manifestasi Islam politik pada era pasca-reformasi kembali ditandai dengan dua arus yang berlawanan. Arus pertama merupakan kelompok seperti JI dan PKS yang membawa narasi penerapan hukum syariah di Indonesia, berlawanan dengan NU dan PAN yang lebih moderat. Berbeda dengan dekade 1950an, kontestasi ini amat berkaitan dengan situasi internasional yang diwarnai dengan gelombang benturan antar peradaban atas nama Jihad dan Perang Melawan Terorisme. Meski demikian, Williams memandang bahwa pemerintahan SBY berhasil dalam mengkooptasi narasi-narasi keislaman ke dalam agenda untuk mendukung stabilitas nasional beserta pertumbuhan ekonomi. Di bawah pemerintahan SBY, Islam yang bersandingan dengan demokrasi menjadi salah satu tengara positif dari identitas politik luar negeri Indonesia. Sinergisme dua elemen ini beserta kapabilitas politik luar negeri yang mumpuni berhasil menjadi jalan bagi peningkatan status Indonesia dalam kancah internasional secara signifikan dalam era reformasi.

Meski demikian, Williams turut mewanti-wanti bahwa potensi akan perubahan akan tetap ada. Ia mengingatkan bahwa diskursus Islam politik dapat turut teradikalisasi sebagaimana ia dapat terkooptasi oleh kebijakan negara. Sedikitnya terdapat tiga isu yang berpotensi meradikalisasi diskursus Islam politik di Indonesia: isu ekonomi yakni kemiskinan dan ketimpangan, isu toleransi antar suku dan agama, dan serta perkembangan isu luar negeri. Melihat dinamika Islam politik akhir-akhir ini, ketiga isu ini menjadi relevan untuk dijadikan pijakan analisis. Terlebih, isu ekonomi dan toleransi kerap kali berkaitan dan menjelma menjadi narasi populis yang semakin berkembang dewasa ini. Sebagai contoh, aksi massa 21 Desember 2016 merupakan interseksi antara isu-isu penistaan agama, kebijakan penggusuran, serta identitas minoritas yang dimiliki oleh Basuki Tjahaja Purnama. Populisme ini juga menjadi alat mobilisasi politik yang potensial sebagaimana ditunjukkan semasa Pemilihan Presiden 2019, di mana dukungan kelompok Islam menjadi strategi utama kemenangan bagi kedua calon presiden. Islam politik juga semakin peka terhadap perkembangan luar negeri, di mana organisasi-organisasi Islam semakin aktif dalam menyikapi nasib Muslim di Suriah, Tiongkok, Myanmar, hingga India. Tak pelak, kebijakan luar negeri Indonesia pada gilirannya perlu mengakomodasi dorongan-dorongan ini dengan intens. Sesuai dengan prediksi Williams kemudian, bahwa kestabilan nasional, pembangunan ekonomi, serta peningkatan status Indonesia akan bergantung pada bagaimana pemerintah mengakomodasi pengaruh Islam politik ke depannya.

Lucke Haryo S. P

Librarian at Institute of International Studies

lucke.h@mail.ugm.ac.id

Institute of International Studies (IIS) is a research institute under the Department of International Relations, Universitas Gadjah Mada, whose purpose is to advance the study of International Relations by carrying out a comprehensive and broad research program. Founded in 2010, IIS provides analysis on current issues, conceptually and policy-wise, thematic databases, consultations and recommendations, aimed at policymakers, research communities, media and interested public. In addition, IIS also engage in advocacy and campaigning activities on various issues in accordance with its mission.

iis.fisipol.ugm.ac.id



**Institute of
International
Studies**
DEPT. OF INTERNATIONAL RELATIONS
UNIVERSITAS GADJAH MADA



facebook.com/IISUGM



[@kop9057g](https://line.me/tv/@kop9057g)



[iis_ugm](https://www.instagram.com/iis_ugm)



[iis_ugm](https://twitter.com/iis_ugm)

for more information about this review, please contact:
IIS Publication Division
publication.iis@ugm.ac.id